WASPADA
Selasa
24 Juli 2018

Komisi Irigasi Sumut Studi Banding Ke NTB

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara menargetkan mencapai kondisi jaringan irigasi mantap atau sebesar 95 persen pada tahun 2018 dengan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas. Target itu sesuai visi misi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dalam upaya peningkatan swasembada pangan. Dari jumlah itu, kewenangan terbesar atau terluas ada di Pemerintah Kabupaten/kota (dengan luasan kurang dari 1.000 hektare). seluas 261.061 hektare dengan jumlah daerah irigasi sebanyak 1.923. Sedangkan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (luasan 1.000 hingga 3.000 hektare) seluas 86.999 hektare dengan jumlah daerah irigasi 78. Pemerintah Pusat dengan kriteria luasan lebih besar dari 3.000 hektare ada seluas 70.530 hektare dengan jumlah daerah irigasi 11. Kewenangan itu sesuai Kepmen PU No 293 tahun 2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota).

Upaya mencapai tujuan dan target dalam pembangunan dan pemberdayaan irigasi, sebanyak 12 orang anggota Komisi Irigasi (Komir) Sumatera Utara melakukan kunjungan studi banding ke Komir Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Rabu (11/7/2018). Rombongan yang dipimpin langsung Sekretris Komir Sumatera Utara Miswan Nasution dengan anggota Komir antara lain Mahyudin Dalimunthe, Warasno, Lukas Sembiring, Otonius Halawa, Jamnus Hutapea dan Erwan Efendi diterima Sekretaris Komir Provinsi NTB H. Ahlul Wakti, ST, MT beserta pengurus dan staf.

Apalagi dari daerah irigasi yang ditangani tahun ini luasan terbesar di Unit Pelaksana Tugas (UPT) PSDA Sibundong Batang Toru seluas 17.083 hektare dengan saluran 1.020 meter.

Disusul UPT PSDA Asahan Danau Toba seluas 18.128 hektare dengan saluran 3.538 meter dan UPT PSDA Bah Bolon 13.758 hektare seluas 3.285 meter. Kemudian UPT PSDA Belawan Padang dengan luasan 12.118 hektare dengan saluran 1.753 meter, UPT PSDA Batang Angkola seluas 12.088 hektare dengan saluran 850 meter. UPT PSDA Lau Renun Lau Biang dengan luasan 3.460 hektare dengan saluran 560 meter, UPT PSDA Wampu Besitang dengan luasan 1.400 hektare dan UPT PSDA Nias dengan luasan 1.258 hektare. Secara fisik, program berjalan 100 persen.

Waspada/Erwan Efendi

SEKRETRIS Komisi Irigasi Sumatera Utara Miswan Nasution (pakai kacamata) bersama rombongan meninjau sistem (irigasi) interkoniksi terminal jurang sate di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada kunjungan studi banding, Rabu (11/7).

PSDA juga berupaya meningkatkan dan memperbaiki luas baku lahan rawa yang seluas 1.012.005 hektare yang letaknya tersebar di pantai timur dan pantai barat. Lahan rawa yang potensial untuk pertanian ada seluas 189.426 hektare dan yang sudah mempunyai tata air jaringan rawa (sudah fungsional) seluas 78.871 hektare (41,64 persen). Dari luas tata air jaringan rawa (sudah fungsional) seluas 78.871 hektare yang menjadi kewenangan provinsi 26.846 hektare dengan jumlah daerah rawa 14. Sedangkan sisanya masing-masing kewenangan Pusat 37.611 hektare dengan jumlah daerah enam dan pemerintah kabupaten/kota 14.414 hektare dengan jumlah daerah 31. Berdasarkan data, kondisi irigasi yang ditangani PSDA Sumut di tahun 2013 adalah 44,44 persen atau 38.662 hektare berkondisi baik, 15,63 persen (13.597 hektar) rusak ringan, 20,49 persen (17.826 hektare) rusak sedang dan rusak berat 19,44 persen atau 16.912 hektare. Sedangkan tahun ini, jumlah irigasi berkategori baik menjadi 60 persen. Alokasi anggaran untuk program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya jumlah biaya APBD sebesar Rp 45,291 miliar.

Dalam pertemuan penuh keakraban itu, Sekretaris Komir Provinsi NTB H. Ahlul Wakti, ST, MT pertama memaparkan profil NTB bahwa provinsi kepulauan ini memiliki dua pulau terbesar yakni pulau Lombok dan pulau Sumbawa serta 278 pulau kecil/gili. Secara administratif NTB terdiri dari dua kota dan delapan kabupaten berada pada jalur strategis "sabuk selatan" transnasional Banda Aceh-Kupang. Jalur transportasi darat nasional yang terpadat dan diapit dua Alur Pelayaran Internasional (API): alur satu melintasi Selat Lombok dan alur dua melintasi Selat Timor. Ahlul juga memaparkan bahwa NTB merupakan Pintu Gerbang pariwisata *(ecotourism)* dan Penopang Pangan Nasional. Pengembangan indistri berbasis komoditas unggulan PIJAR (Sapi, Jagung, dan Rumput Laut), industri perikanan, garam dan pengembangan industri pertambangan mangan dan tembaga.

NTB sebagai lumbung beras nasional dimana pada tahun 2017 produksi padi mencapai 2,3 juta ton meningkat 11-12 persen dibanding tahun 2016 sebesar 2,09 juta ton degan tingkat produktivitas lahan rata-rata 5,1 ton/hektare. NTB juga tetap diandalkan sebagai salah satu daerah penyuplai produksi daging sapi dan pusat pembibitan nasional sapi Bali. Populasi sapi pada tahun 2013 sejumlah 1.002.731 ekor meningkat pada tahun 2017 menjadi 1.149.540 ekor.

Sebagai daerah penopang pangan nasional, NTB terus mebena diri dan dalam upaya mempertahankan serta meningkatkan produksi padi, NTB melakukan pengembangan bendungan untuk memenuhi kebutuhan air bagi petani. Kondisi saat ini, dengan sejumlah bendungan air yang dimiliki, NTB barada pada posisi stabil sebagai lumbung beras nasional. Selain melakukan revitalisasi bendungan lama yakni dengan memperkuat daya dukung lingkungan juga mengatur kembali manajemen pengelolaan air. Kemudian membuat bendungan baru seperti bendungan Pandan Dure (2011-2015), Bintang Beno (2014-2018), Rababaka Kompleks (2015-2018), biaya pembangunannya mencapai Rp.3,5 triliun.

Upaya mempercepat pembangunan irigasi, Ahlul menegaskan, daerah harus memiliki perangkat hukum atau regulasi yang menguatkan atau mendorong pembanguna infrstruktur tersebut seperti peraturan daerah (Perda) tentang percepatan pembangunan irigasi. Dengan adanya regulasi khusus tentang irigasi, maka semua pihak baik eksekutif maupun legisatif akan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Perda tersebut yakni percepatan pembangunan irigasi untuk memenuhi kebutuhan petani terhadap air. Selain itu, juga diperlukan peraturan gubernur tentang pembentukan Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) dan menjadikan lebaga tersebut mandiri. Keranya, pemerintah selalu dan harus mendorong P3A untuk memiliki badan hukum sendiri, sehingga dalam aktivitasnya tidak tergandung kepada yang lain.

P3A adalah kelompok yang dibentuk oleh petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, air permukaan, embung/dam parit dan air tanah. Sedang keberaan P3A adalah untuk mewujudkan sistem pengembangan dan pengelolaan air irigasi yang baik dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan kelembagaan petani yang kuat, mandiri dan berdaya saing. P3A adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi dan pemakain air irigasi lainnya.

Kita berharap keberadaan Komir Sumatera Utara dapat semakin meningkatkan fungsi dan perannya dalam memberdayakan P3A dan lembaga lainnya. Begitu juga dalam meningkatkan produksi padi. Secara nasional, harusnya Sumatera Utara layak dan pantas menjadi lumbung padi nasional dan menjaga ketahanan pangan nasional. Sebab, dibanding NTB, Sumatera Utara memiliki lahan potensi yang cukup luas untuk tanaman padi. Namun, dibanding Komir Sumatera Utara, eksistensi Komir NTB sudah jauh lebih banyak berbuat dibanding. Apalagi jika dibanding alokasi anggaran bahwa Komir NTB jauh lebih sedikit dibanding Komir Sumatera Utara. Tahun 2017, Komir NTB hanya memperoleh anggaran Rp 611.333.400 sementara Komir Sumatera Utara menerima alokasi anggaran tahun 2017 Rp.925 juta dan tahun 2018 bertambah menjadi Rp.1,5 miliar. Kita memahami bahwa ketertinggalan Komir Sumatera Utara tesebut disebabkan antar lain usia Komir Sumatera Utara juah lebih mudah dibanding Komir NTB, selain itu bahwa NTB hanya memiliki 10 kabupaten/kota sedang Sumatera Utara 33 kabupaten/kota. Begitu pun, dengan potensi yang dimiliki kita optimis bahwa Komir Sumatra Utara akan lebih jauh lebih eksis. Semoga.

 # Erwan Efendi

Dipindai dengan CamScanner